



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2 /2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya tanaman pangan.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, SP36, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani/ LMDH berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, pesanggem, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, pesanggem, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III

### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pesanggem, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.
- (3) Dinas / Badan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Camat wajib menyampaikan rencana mingguan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada KP3 Kabupaten menurut desa, jenis dan jumlah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat dalam menyusun rencana mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).
- (3) Rencana mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KP3 Kabupaten paling lambat pada tanggal 25 bulan sebelumnya.

#### Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kabupaten/Kota.

### BAB IV

#### PENYALURAN DAN HET

#### Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP 36, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokomia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.600,- per kg;
  - b. Pupuk SP 36. : Rp. 2.000,- per kg;
  - c. Pupuk Z A : Rp. 1.400,- per kg;
  - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg;
  - f. Pupuk Organik : Rp. 700,- per kg;
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

## Pasal 8

- (1) Produsen, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pesanggem, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten.

## Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyuluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dikoordinir oleh Camat.

## Pasal 11

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan mingguan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KP3 Kabupaten dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) KP3 Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010, Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 52; dan

- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010, Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 17, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 02 Mei 2011

Plh. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

  
H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 02 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAN
SEKDA	
ASISTEN I	
EA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 22

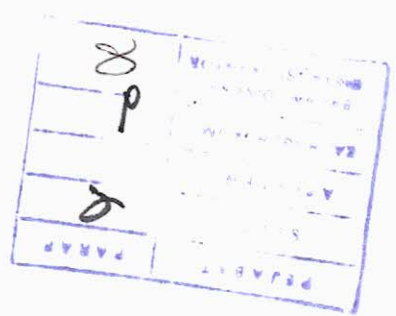
FORMAT LAPORAN MINGGUAN PEMANTUAN DAN PENGAWASAN  
 PUPUK BERSUBSIDI

Kecamatan : SATUAN : TON

No	Desa / Kelurahan	Urea	Z A	SP-36	N P K	Organik	Minggu .. (tgl) .. s/d ..		
							Jumlah	dst	
1									
2									
3									

CAMAT ..  
 NIP. ....

PIH. BUPATI REMBANG  
 WAKIL BUPATI,  
 H. ABDUL HAFIDZ





FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
PUPUK BERSUBSIDI

Kecamatan :  
Desa :  
Nama Kelompok Tani / LMDH \*) :  
Sub Sektor : Pertanian / Perkebunan/ Perikanan \*)  
Nama Distributor/ Kios :

No	Nama Petani	Komoditas	Luas(ha)	Jumlah Kebutuhan Pupuk (kg)					Tanggal Penggunaan	Tanda Tangan	
				Urea	Z A	SP 36	NPK	Organik			
1									1		
2										2	
3										3	
4										4	
5										5	
6										6	
7										7	
8										8	
9										9	
10										10	
11										11	
12										12	
13										13	
14										14	
15										15	
16										16	
17										17	
18										18	
19										19	
20										20	
21										21	
22										22	
23										23	
24										24	
25										25	
26										26	
27										27	
28										28	
29										29	
30										30	
31										31	
32										32	
33										33	
34										34	
35										35	
dst, ...											
Jumlah											

Keterangan:

\*) Coret yg tidak perlu

Kecamatan .....

2011

Menyetujui :  
Koordinator PPL

Mengetahui PPL Wilbin/KRPH  
.....

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

Ketua Klp. Tani/LMDH  
.....

NIP. ....



Pih. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI,

*(Handwritten signature)*  
K. ABDUL HAQIDZ

## LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Rembang

Nomor :

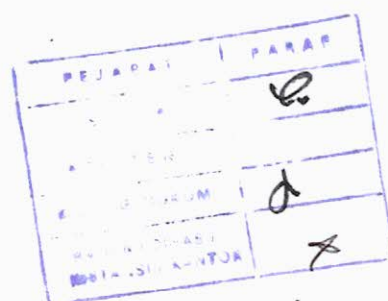
Tanggal : 2011

**DOSIS REKOMENDASI PEMUPUKAN PER JENIS KOMODITAS  
TAHUN 2011 DI KABUPATEN REMBANG**

NO	KOMODITAS	Satuan : kg/ Ha					
		UREA	SP- 36	Z A	KCL	NPK	Organik
1	Padi Sawah	300	100	25	25	100	500
2	Padi Gogo	250	100	0	25	100	500
3	Jagung Hibrida	325	100	0	0	150	500
4	Kedelai	75	50	0	0	0	0
5	Kacang Tanah	50	100	0	0	0	0
6	Kacang Hijau	50	75	0	0	0	0
7	Ubi Kayu	150	100	0	0	0	0
8	Ubi Jalar	150	100	0	0	0	0
9	Melon	0	300	700	200	100	1000
10	Cabe Merah	0	100	0	0	200	1000
11	Cabe Rawit	0	100	0	0	200	0
12	Bawang Merah	0	0	600	0	200	1000
13	Mangga ( /Ha)	0	0	250	0	250	1000
14	Mangga ( /pohon)	0	0	2	0	2	10
15	Tebu	0	0	500	0	500	2000
16	Tambak Bandeng / Udang	200	100	0	0	0	0

Pih. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI,

  
H. ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

SATUAN : TON

A. JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	1.713	215,00	161,50	29,00	150,00	5,00	11,00	3,00	8,50	24,00	205,00	513,00	388,00
2	Kalioti	1.848	336,00	248,00	135,00	139,00	9,00	11,00	3,00	1,00	8,00	474,00	203,00	281,00
3	Sulang	1.720	224,50	135,50	136,50	67,00	48,00	17,00	39,00	43,50	116,00	347,00	334,00	212,00
4	Sumber	1.920	209,00	216,00	158,50	121,00	8,00	37,00	80,00	93,50	286,00	359,00	171,00	181,00
5	Bulu	1.654	101,00	93,00	81,00	71,00	61,00	50,00	63,00	24,00	61,00	294,00	354,00	401,00
6	Lasem	734	136,50	29,50	26,00	20,00	11,00	41,00	13,00	6,00	8,00	41,00	177,00	225,00
7	Pancur	848	90,50	27,50	17,50	35,00	27,00	31,00	14,00	14,50	29,00	73,00	261,00	228,00
8	Sluke	960	152,50	66,00	107,50	37,00	27,00	23,00	18,00	18,00	39,00	152,00	130,00	190,00
9	Kragan	1.864	252,00	109,00	21,00	136,00	98,00	134,00	43,00	49,00	108,00	216,00	404,00	294,00
10	Sarang	2.039	238,00	173,00	125,50	181,00	113,00	96,00	46,00	75,50	65,00	193,00	389,00	344,00
11	Sedan	2.276	382,00	171,50	115,00	134,00	87,00	201,00	116,00	35,50	16,00	199,00	456,00	363,00
12	Pamotan	1.896	214,00	75,50	54,00	112,00	107,00	86,00	17,00	37,50	134,00	274,00	496,00	289,00
13	Gunem	1.758	189,00	37,50	125,00	139,00	124,00	57,00	33,00	33,50	52,00	289,00	434,00	245,00
14	Sale	1.770	110,00	101,50	112,00	161,00	97,00	114,00	89,00	84,50	95,00	213,00	271,00	322,00
<b>JUMLAH</b>			<b>2.850,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>1.243,50</b>	<b>1.503,00</b>	<b>822,00</b>	<b>909,00</b>	<b>577,00</b>	<b>524,50</b>	<b>1.041,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>4.593,00</b>	<b>3.963,00</b>

## B. JENIS PUPUK : ZA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	505	29,00	22,00	29,00	19,00	22,00	30,00	54,00	58,00	68,00	67,00	75,00	32,00
2	Kaliori	543	17,00	52,00	42,00	32,00	30,00	35,00	34,00	52,00	70,00	74,00	78,00	27,00
3	Sulang	1.486	219,50	89,50	121,00	31,00	50,50	80,00	99,50	125,00	130,00	190,00	200,00	150,00
4	Sumber	862	50,50	91,50	51,00	37,00	24,50	50,00	53,50	85,00	92,00	125,00	127,00	75,00
5	Bulu	780	45,00	27,00	19,00	32,00	47,00	60,00	70,00	74,00	100,00	113,00	116,00	77,00
6	Lasem	75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	3,00	7,00	10,00	20,00	20,00	6,00
7	Pancur	599	45,50	38,00	13,00	26,00	20,50	23,00	24,00	34,00	55,00	125,00	135,00	60,00
8	Sluke	80	2,00	0,00	9,00	2,00	1,00	4,00	3,00	5,00	8,00	23,00	19,00	4,00
9	Kragan	577	24,50	26,00	29,00	42,00	46,50	49,00	39,00	81,00	62,00	71,00	60,00	47,00
10	Sarang	575	55,50	42,00	44,00	35,50	32,50	47,00	37,50	54,00	65,00	69,00	57,00	36,00
11	Sedan	574	24,00	9,00	8,00	34,00	36,00	43,00	52,00	56,00	80,00	95,00	87,00	50,00
12	Pamotan	1.625	181,00	82,00	73,00	88,00	81,00	92,00	100,00	192,00	151,00	181,00	200,00	204,00
13	Gunem	423	41,00	3,00	42,00	29,00	28,00	30,00	32,00	39,00	47,00	50,00	52,00	30,00
14	Sale	561	4,00	11,00	6,00	35,00	39,00	34,00	53,00	65,00	82,00	87,00	93,00	52,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.265</b>	<b>738,50</b>	<b>493,00</b>	<b>486,00</b>	<b>444,50</b>	<b>460,50</b>	<b>582,00</b>	<b>654,50</b>	<b>927,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.319,00</b>	<b>850,00</b>

## C. JENIS PUPUK : SP- 36

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	143	51,00	26,00	8,00	4,00	3,00	4,00	6,00	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00
2	Kaliori	145	14,50	59,00	2,00	3,50	5,00	5,00	7,00	6,00	10,00	10,00	12,00	11,00
3	Sulang	162	26,50	27,50	22,50	5,00	5,00	6,50	7,00	9,00	11,00	14,00	15,00	13,00
4	Sumber	174	35,50	21,00	5,00	7,00	7,50	8,00	10,00	10,00	15,00	16,00	20,00	19,00
5	Bulu	151	38,00	0,00	0,00	5,00	7,00	7,00	8,00	14,00	15,00	18,00	21,00	18,00
6	Lasem	58	9,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	2,00	4,00	6,00	10,00	11,00	10,00
7	Pancur	89	27,00	12,00	0,00	2,00	2,00	3,00	5,00	5,00	7,00	9,00	9,00	8,00
8	Sluke	72	34,00	8,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	7,00	5,00
9	Kragan	211	35,50	26,00	14,00	6,50	8,00	9,00	11,00	12,00	20,00	23,00	25,00	21,00
10	Sarang	175	49,50	20,00	55,00	2,00	2,50	3,00	3,00	5,00	6,00	10,00	11,00	8,00
11	Sedan	213	61,00	29,00	15,50	5,50	5,00	6,00	8,00	8,00	12,00	20,00	25,00	18,00
12	Pamotan	157	14,00	17,00	15,50	6,00	6,00	7,50	8,00	10,00	14,00	19,00	21,00	19,00
13	Gunem	215	26,00	14,00	2,00	8,00	10,00	10,00	12,00	14,00	22,00	32,00	35,00	30,00
14	Sale	142	16,00	11,00	16,00	5,00	7,00	6,00	6,00	8,00	10,00	18,00	21,00	18,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.107</b>	<b>437,50</b>	<b>270,50</b>	<b>155,50</b>	<b>61,50</b>	<b>72,00</b>	<b>79,00</b>	<b>95,00</b>	<b>114,00</b>	<b>159,00</b>	<b>212,00</b>	<b>243,00</b>	<b>208,00</b>

## D. JENIS PUPUK : NPK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	665	67,00	40,00	23,00	44,00	48,00	45,00	41,00	76,00	64,00	92,00	82,00	43,00
2	Kaliore	897	45,00	85,00	152,50	67,00	69,00	54,00	51,50	75,00	96,00	91,00	67,00	44,00
3	Sulang	1.300	69,00	43,00	63,50	63,00	79,00	60,00	67,00	171,00	159,50	189,00	192,00	144,00
4	Sumber	970	28,50	66,00	64,00	54,00	42,00	37,00	66,50	134,00	132,00	136,00	119,00	91,00
5	Bulu	986	11,00	2,00	43,00	53,00	41,00	54,00	58,00	153,00	142,00	169,00	159,00	101,00
6	Lasem	415	0,00	8,00	0,00	25,00	20,00	20,00	27,00	48,00	46,00	76,00	79,00	66,00
7	Pancur	554	21,50	25,00	17,00	21,00	24,00	29,00	43,50	78,00	76,00	79,00	76,00	64,00
8	Sluke	367	3,00	8,00	13,00	24,00	21,00	54,00	22,00	38,00	42,00	48,00	53,00	41,00
9	Kragan	1.049	27,00	47,00	34,00	47,00	49,00	49,00	66,00	134,00	128,00	153,00	170,00	145,00
10	Sarang	1.159	78,00	44,00	94,00	96,00	92,00	57,00	70,00	125,00	138,00	115,00	135,00	115,00
11	Sedan	1.084	44,00	27,00	20,50	63,00	57,00	64,00	73,00	125,00	145,50	170,00	175,00	120,00
12	Pamatan	1.150	93,00	38,00	37,50	45,00	75,00	64,00	70,00	162,00	166,50	165,00	118,00	116,00
13	Gunem	956	27,00	4,00	14,00	50,00	62,00	43,00	66,00	152,00	131,00	160,00	135,00	112,00
14	Sale	954	59,00	28,00	41,50	34,00	70,00	47,50	86,00	86,00	107,00	140,00	154,00	101,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.506</b>	<b>573,00</b>	<b>465,00</b>	<b>617,50</b>	<b>686,00</b>	<b>749,00</b>	<b>677,50</b>	<b>807,50</b>	<b>1.557,00</b>	<b>1.573,50</b>	<b>1.783,00</b>	<b>1.714,00</b>	<b>1303,00</b>

## E. JENIS PUPUK : ORGANIK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	308	7,00	1,00	3,00	36,00	17,00	15,00	14,00	19,00	20,00	59,00	58,00	59,00
2	Kaliori	295	7,40	20,00	7,40	22,00	19,20	15,00	16,00	16,00	36,00	46,00	48,00	42,00
3	Sulang	258	1,00	13,00	7,00	20,00	20,00	12,00	14,00	14,00	24,00	43,00	54,00	36,00
4	Sumber	310	6,80	23,00	9,60	18,00	19,00	18,00	16,00	15,00	26,00	52,60	54,00	52,00
5	Bulu	349	5,00	0,00	7,00	38,00	20,00	21,00	20,00	19,00	24,00	65,00	72,00	58,00
6	Lasem	115	0,00	0,00	0,00	10,00	11,00	11,00	10,00	13,00	14,00	15,00	17,00	14,00
7	Pancur	113	0,00	4,00	0,00	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	14,00
8	Sluke	108	0,00	2,00	3,00	8,00	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00	14,00
9	Kragan	305	6,00	21,00	12,00	20,00	22,00	22,00	19,00	17,00	29,00	45,00	47,00	45,00
10	Sarang	315	17,00	1,00	38,00	22,00	25,00	21,00	16,00	16,00	32,00	45,00	42,00	40,00
11	Sedan	410	11,00	12,00	5,00	27,00	30,00	32,00	24,00	19,00	31,00	76,00	68,00	75,00
12	Pamotan	308	5,00	10,00	7,00	27,00	19,00	14,00	15,00	15,00	20,00	65,00	62,00	49,00
13	Gunem	327	1,00	6,00	0,00	33,00	20,00	13,00	13,00	14,00	40,00	64,00	64,00	59,00
14	Sale	244	7,00	1,00	6,00	39,00	16,00	14,00	13,00	18,00	28,00	34,00	37,00	31,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.765</b>	<b>74,20</b>	<b>114,00</b>	<b>105,00</b>	<b>329,00</b>	<b>257,20</b>	<b>228,00</b>	<b>211,00</b>	<b>218,00</b>	<b>349,00</b>	<b>637,60</b>	<b>654,00</b>	<b>588,00</b>

Pih BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI,

  
H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	
SURAT	
ASISTEN	
BA. BAG. HUKUM	
BAGIAN / DINAS /	
INSPEKSI / ANTIKOR	

FORMAT RENCANA MINGGUAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

SATUAN : TON

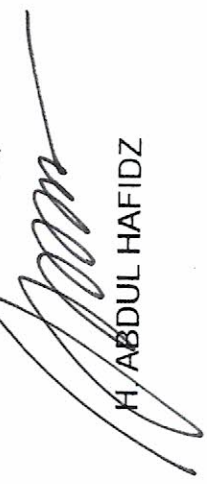
Kecamatan :

No	Desa/ Kelurahan	Bulan .....												Jumlah					
		Minggu I (tgl .... s/d .....			Minggu II (tg ..... s/d .....			Minggu III (tgl .... s/d .....			Minggu IV (tg ..... s/d .....				Minggu V (tgl .... s/d .....				
		Urea	SP-36	NPK	Urea	SP-36	NPK	Urea	SP-36	NPK	Urea	SP-36	NPK		Urea	SP-36	NPK		
1																			
2																			
3																			
dst																			

CAMAT .....

NIP .....

Pih. BUPATI REMBANG  
 WAKIL BUPATI,



H. ABDUL HAFIDZ

